

PENGUKURAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DELI SERDANG

Dito Aditia Darma Nasution, Galih Supraja, Annisa Fajariah Damanik

Universitas Pembangunan Panca Budi , Indonesia

email: ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id

RINGKASAN- Penelitian ini dilatarbelakangi dimana aset (Barang Milik Daerah) wajib menggunakan syarat yg sesuai aturan. Berdasarkan wujud tertibkannya aset, inventarisasi & evaluasi merupakan bagaimana pengelolaan aset pada setiap penggunaan barang lebih akuntabel & transparan, sebagai akibatnya aset bisa dioptimalkan penggunaan & pemanfaatannya guna menunjang fungsi pelayanan. Adapun tujuan penelitian yaitu mengetahui seberapa efektif pengelolaan barang milik daerah. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dan teknik mengumpulkan data melalui metode wawancara, dokumentasi & *internet searching*. Berdasarkan hasil temuan diperoleh output bahwa analisis pengelolaan aset Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang belum berjalan sesuai aturan serta pengelolaan aset belum diimplementasikan dengan baik sebagaimana amanah perundang-undangan. Selain itu, ditemukan juga berbagai kendala pada pengelolaan aset.

Keywords: *Manajemen sektor publik, kesejahteraan warga desa, efektivitas pengelolaan barang milik wilayah.*

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemda diarahkan buat mewujudkan kesejahteraan warga melalui peningkatan pelayanan & daya saing dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan & pelayanan, barang milik daerah wajib dikelola dengan baik dan memperhatikan asas fungsional, kepatuhan, transparansi, efisiensi, akuntabilitas & kepastian nilai. Untuk menunjang pengelolaan aset supaya terealisasi dengan baik maka diharapkan adanya kecenderungan persepsi dan langkah menyeluruh berdasarkan unsur-unsur yg terkait. Oleh karenanya, pemda membutuhkan aset yg akan

mendukung seluruh urusan pemerintah. Barang Milik Daerah diatur Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak sekedar administratif saja, namun lebih krusial yakni menangani aset daerah, sehingga dapat menaikkan efisiensi, efektivitas & membentuk nilai tambah dalam mengelola aset. Aset dapat diklasifikasikan dua bagian yaitu:

1. *Real property*, mencakup tanah, gedung, irigasi, jembatan & jalan, dan lain-lain.
2. *Personal property*, mencakup kendaraan, alat-alat (misalnya alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, & alat keamanan), dan lain-lain.

Pengelolaan aset dianggap penting dikarenakan dapat mendukung keberhasilan ketatausahaan instansi. Instansi memiliki aset (Barang Milik Daerah) yang wajib terjaga. Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah satker dibidang pekerjaan umum & aset wilayah sehingga sangat banyak aset yg dikelola sebagai akibatnya sangat rentan bisa disalahgunakan. Bagaimana syarat aset yg dikelolanya dapat di lihat pada tabel berikut :

TABEL 1.
Daftar Aset Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

No.	Aset Tetap (Barang Milik Daerah)	Keterangan	Kondisi
1.	Tanah	Diperoleh buat digunakan pada aktivitas operasional pemerintah & pada syarat siap digunakan. Tanah adalah asset pemerintah yg penting pada operasional pemerintahan & pelayanan pada warga.	Cukup Baik
2.	Peralatan & Mesin	Meliputi mesin, kendaraan, elektronik, semua inventaris tempat kerja & alat-alat lainnya yg nilainya signifikan serta masa manfaatnya lebih 12 bulan & pada syarat siap pakai. Contoh : Komputer, Laptop, AC, Mesin Ketik, Printer, Lemari, Filling Kabinet, Meja, Kursi, Mesin Genset, dll.	Cukup Baik
3.	Gedung & Bangunan	Meliputi semua gedung & bangunan yg digunakan pada aktivitas operasional pemerintah & pada syarat siap pakai. Contoh : Rehabilitasi Pembangunan Balai Desa, Rehabilitasi Kantor Kecamatan.	Baik
4.	Jalan & Air Minum	Dibangun pemerintah, dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah & pada syarat siap digunakan. Contoh : jalan lingkungan pada gang, pemeliharaan yg kerusakannya dibawah 30%, rehabilitasi diatas 30% hingga 50%.	Baik

5.	Aset Tetap Lainnya	Meliputi aset permanen yg tidak bisa dikelompokkan pada grup aset permanen, namun memenuhi definisi aset permanen. Aset ini bisa mencakup koleksi perpustakaan/kitab & barang bercorak seni/ budaya/ olah raga.	-
6.	Konstruksi pada pengerjaan	Meliputi aset permanen yg sedang pada proses pembangunan tetapi belum terselesaikan seluruhnya. Aset ini dicatat hingga akhir masa pengerjaan dalam tahun yg bersangkutan.	-

Sumber : Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

Konklusi pada tabel dapat dijelaskan bahwa jumlah aset yg dimiliki Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman pada syarat yg cukup baik terlihat bahwasannya aset tanah, alat-alat & mesin pada syarat relatif baik, sedangkan aset gedung bangunan, jalan & air minum pada syarat baik. Tetapi demikian syarat aset yg lainnya tidak lantas dilupakan baik yg rusak, hilang & pada pengerjaan, walaupun tidak tampak. Pengelolaan aset adalah tahapan proses mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah supaya terkelola baik & tersajikan pelaporannya secara administrasi yg seksama.

Pengelolaan barang milik daerah bisa menentukan nasib suatu wilayah lantaran pengembangan wilayah, tergantung dalam cara pengelolaan barang milik daerah masing-masing. Pengelolaan aset wajib diatur & ditangani sebaik mungkin dan taat terhadap perundang-undangan yg berlaku. Permasalahannya adalah bagaimana output aktivitas penertiban aset & pengaruhnya terhadap kewajaran nilai aset yg tersaji pada laporan keuangan. Penyajian yg baik pada laporan keuangan dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

Laporan keuangan Pemda untuk pertanggungjawaban kepada rakyat akan diperiksa oleh BPK lalu diberikan opini setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan permasalahan yang memiliki urgensi tinggi. Oleh karenanya, dianggap perlu untuk meneliti efektivitas pengelolaan barang milik daerah dengan koridor pengelolaan menaruh acuan bahwa aset daerah wajib dikelola semaksimal mungkin guna mendukung kelancaran tupoksi pelayanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Parameter penelitian adalah nilai atau syarat yg dijadikan tolak ukur untuk menemukan sesuatu buat mengisi kekosongan atau kekurangan dan menggali lebih pada apa yg sudah terdapat, menyebarkan & memperluas, dan menguji kebenaran berdasarkan apa yg sudah terdapat tetapi kebenarannya masih diragukan. Parameter yg diamati pada penelitian ini yaitu menganalisis pengelolaan aset Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengumpulkan data & warta yg diharapkan, maka peneliti memakai metode observasi & wawancara. Teknik analisis data pada penelitian ini memakai penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis naratif.

Penelitian ini dilakukan dalam Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian dilaksanakan mulai November 2021 hingga Februari 2022. Jenis Penelitian memakai jenis penelitian naratif. Penelitian naratif adalah suatu penelitian yg mendeskripsikan secara sistematis tentang fakta, situasi & kegiatan berdasarkan objek yg diteliti. Populasi merupakan para pegawai Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Adapun Sampel penelitian ini tercantum dalam tabel berikut :

TABEL 2.
Daftar Sampel

Bidang	Sampel
Sub.Bag. Keuangan	2
Sub.Bag. Umum	1
Sub.Bag. Program	1
Bid. Gedung & Bangunan	1
Bid. Pertanahan	1
Jumlah	6

Teknik data yg dilakukan merupakan teknik analisis deskriptif kualitatif menggunakan Model Miles & Huberman. Aktivitas pada analisis data yaitu data *reduction, display, conclusion drawing/verification*, sebagai berikut:

1. *Data Reduction*, data yg diperoleh berdasarkan penyaringan, banyaknya data yg tidak krusial, sehingga kita wajib teliti memilihnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

2. *Data Display*, Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sanggup tersaji pada urusan singkat, interaksi antara kategori & sejenisnya. Penyajian data kualitatif menggunakan teks yg bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan buat tahu apa yg terjadi, merencanakan kerja selanjutnya menurut apa yg dipahami tadi.
3. *Conclusion Drawing/Verification*, Langkah ketiga merupakan penarikan konklusi & verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat ad interim & akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yg kuat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil temuan penelitian didapatkan melalui hasil wawancara dengan menggali informasi kepada informan. Untuk menjaga integritas informan maka identitas informan dirahasiakan. Adapun hasil wawancara telah diolah dan rincikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset pada Kabupaten Deli Serdang yg dilakukan Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman berdasarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :
 - a) PP No. 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b) PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c) PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - d) PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 - e) UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemda;
 - f) Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Tahap pengelolaan aset yg dilakukan Dinas Perumahan & Kawasan

Permukiman Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan perencanaan kebutuhan barang tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan tugas & fungsi satker. Perencanaan kebutuhan barang yang keliru satu dasar bagi Satuan Kerja pada pengusulan penyediaan aturan buat kebutuhan baru, penyusunan planning kerja & aturan. Pemenuhan permintaan pengadaan barang satker tidak secara holistik diterima tetapi hanya kurang lebih 70% hingga 80%.

3. Pengadaan aset dilaksanakan setiap tahun sesudah rencana kerja satker ditetapkan.
4. Pengadaan aset dibeli maupun didapatkan berdasarkan pagu APBD.
5. Pengelolaan aset dikelola oleh Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman yaitu barang bergerak & barang tidak bergerak yang dikuasai Pemda baik sebagian maupun seluruhnya dibeli atas pagu APBD dan perolehan lain yg sah. Barang-barang yg dikuasai Pemda & barang-barang yg diserahkan penggunaannya/ pemakaiannya pada Instansi/ Lembaga Pemda juga dalam Instansi/ Lembaga lainnya menurut ketentuan yg berlaku.
6. Dalam hal perawatan aset Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman mengelola barang-barang umum selain yg dikelola satker pada Instansi tertentu. Perawatan yg dilakukan sang masing-masing satker yaitu perawatan pada kadar ringan, sedangkan pada hal perawatan pada kadar berat lantaran kerusakan sebagai akibatnya barang tidak sanggup dipakai maka yg melakukan perawatan merupakan Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang.
7. Pelaporan perawatan aset yg dilakukan sang masing-masing satker hingga waktu ini belum terdapat pelaporan secara bersiklus pada Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman menjadi induk berdasarkan pengelola barang milik daerah.
8. Inventaris pada setiap instansi diwajibkan memberikan kartu inventarisasi barang, misalnya contohnya barang-barang yg terdapat pada satu ruangan pada instansi wajib mempunyai kartu inventarisasi barang, sehingga perawatan & pengecekan bisa dilakukan dengan mudah.

9. Pengawasan aset dilakukan Sekda melalui inspektorat & BPK. BPK melakukan supervisi dan memberikan arahan agar pengelolaan aset lebih baik & menaruh koreksi bila masih ada temuan suatu hal yg dipercaya kurang tepat.
10. Terkait hambatan pada pengelolaan aset masih ada hambatan yaitu pada hal teknis dilapangan.
11. Dalam hal penyusunan laporan antara akuntansi publik menggunakan barang milik daerah sebagai satu, hal ini sebagai hambatan dikarenakan penyusunan laporan antara akuntan publik menggunakan barang milik daerah tidak selaras pada hal teknis laporan.

Pengelolaan barang milik wilayah tentunya secara holistik yang sudah diatur pada peraturan yang berlaku tentang pengelolaan barang milik wilayah. Barang yg dimiliki pemerintah daerah sangat banyak & bervariasi. Akumulasi barang milik daerah yg secara fisik terdiri atas aneka macam jenis & barang/ aset tadi beredar lokasinya & pengelola barang yg beragam berpotensi mengakibatkan permasalahan baik pada pengelolaan, pemanfaatan, juga pencatatan. Meskipun pada pengelolaan barang milik daerah sudah sinkron menggunakan dasar peraturan pengelolaan yg terdapat, baik berdasarkan pemerintah pusat juga berdasarkan pemerintah daerah. Kendala pada pengelolaan aset milik daerah ada dalam waktu proses pengelolaan aset daerah dan implementasi peraturan-peraturan terkait.

Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mengalami hambatan pada pengelolaan barang milik daerah. Konflik yg ada dikarenakan SDM pengelola barang & masih mengalami keterlambatan pada proses administrasi pekerjaannya, dikarenakan perkara penandatanganan berkas-berkas & pengecekan ulang di lapangan, sebagai akibatnya proses pengelolaannya masih belum optimal, lalu permasalahan yg terletak dalam pekerjaan pada lapangan yg terganggu menggunakan faktor cuaca misalnya hujan. Konflik ini terletak pada aneka macam bagian berdasarkan termin pengelolaan barang milik daerah, tetapi tidak seluruh bagian pada pengelolaan barang milik daerah yg dikelola Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman mengalami hambatan.

Pembahasan

Menurut Mahmudi (2011), Sistem Akuntansi Pemda merupakan serangkaian mekanisme manual juga yg terkomputerisasi mulai berdasarkan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran hingga menggunakan pelaporan posisi keuangan & operasi keuangan Pemda. Adapun yg sebagai tujuan Sistem Akuntansi Pemda, antara lain :

1. Menjaga aset; supaya aset pemerintah bisa terjaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan, & pelaporan keuangan yg konsisten sinkron menggunakan baku.
2. Warta yg relevan; menyediakan informasi yg seksama & sempurna saat mengenai aturan & aktivitas keuangan pemerintah, menjadi dasar evaluasi kinerja buat memilih ketaatan terhadap otorisasi aturan & tujuan akuntabilitas.
3. Memberikan warta yg bonafide mengenai posisi keuangan pemerintah.
4. Menyediakan warta keuangan yg bermanfaat buat perencanaan, pengelolaan, & pengendalian aktivitas & keuangan pemerintah secara efisien.

Dalam melakukan pemrosesan data aset daerah guna penatausahaan barang, terdapat beberapa sistem pengelolaan barang yaitu:

1. Sistem perencanaan. Perencanaan adalah termin awal berdasarkan pengelolaan aset daerah. Output yg didapatkan antara lain Daftar Kebutuhan Barang & pemeliharaan dan daftar rencana pengadaan barang.
2. Sistem pengadaan. Pada bagian data pengadaan bisa dipakai buat memantau proses pengadaan aset daerah sebelum dicatat menjadi aset. Dalam mekanisme ini mencakup pencatatan & kontrak/surat perintah kerja, surat perintah pencairan dana (SP2D) dan posting ke KIB. Sedangkan dalam bagian inventarisasi bisa dimanfaatkan buat melakukan penambahan aset yaitu tanah (KIB A), alat-alat & mesin (KIB B), gedung & bangunan (KIB C), jalan irigasi & jaringan (KIB D), kitab & perpustakaan, barang yg bercorak kebudayaan dan fauna, ternak & flora (KIB E), & kontruksi pada pengerjaan (KIB F).
3. Sistem penggunaan. Penggunaan bisa dimanfaatkan buat mencatat data

pengguna barang milik wilayah menurut surat keputusan penggunaan aset yg sudah ditetapkan.

4. Sistem penatausahaan. Mengubah data, mutasi aset, kapitalisasi, koreksi & mengganti syarat barang milik daerah.
5. Sistem pemeliharaan. Untuk mengelola data transaksi pemeliharaan aset daerah.
6. Sistem penghapusan. Penghapusan bisa dipakai buat penghapusan aset permanen & penghapusan sebagian aset. Penghapusan aset memilih aset yg akan dihapuskan berdasarkan register aset.

SIMPULAN

Berdasarkan output penelitian yg diperoleh, maka penulis menarik konklusi bahwa:

1. Pengelolaan aset yg diterapkan Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman seluruhnya sudah sinkron menggunakan anggaran dan aturan yg berlaku yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dimana seluruh anggaran sudah terlaksanakan secara baik & sah. Tetapi tidak dalam pengguna barang, lantaran dalam penerapannya pengguna barang memiliki hasrat untuk mempunyai kendaraan dinas yg terkadang menyalahi anggaran.
2. Administrasi pengelolaan barang milik daerah Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman telah berjalan baik, tetapi terdapat keterlambatan pada pelaporannya baik pada penandatanganan juga pekerjaan di lapangan. Selebihnya para pegawai telah mengelola & memakai barang sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Jauhari. (2012). *Akuntansi Aset Tetap* (www.slideshare.net).
- Alan Wonggow, Ventje Ilat, Dhullo Affandi. (2014). *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007*.
- Anshari, Efrizal Syofyan. (2011). *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang*.

- Annafia Utami, Yeni Priatna Sari. (2017). *Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) – Barang Milik Daerah (Bmd) Pada DPPKAD Kabupaten Pemalang*.
- Brilliant Yehezkiel Sondakh, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikere. 2014. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)*.
- Conda Liesye Yolinita Dita Kalangi, Lintje Kalangi, Jessy D.L Warongan. (2017). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara Dosen pendidikan. (2014). Karakteristik Aset Tetap (dosenpendidikan.com)*
- Eko Raharjo. (2006). *Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*.
- Era Nandya Febriana. (2017). *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Esduo Ramadhano Labasido, Darwanis. (2019). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh*.
- Fikha Kristy Bolendea, Ventje Ilat, Jessy Warongan. (2017). *Analisis Penggunaan Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado*.
- Fitri Wulandari. (2019). *Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*.
- Hariyanti Hamid, Abdul Rahman. (2015). *Kinerja Pengurusan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang*.
- I Dewa Nyoman Ariasa, Gede Wirata. (2018). *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Penelitian Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar)*.
- Ikbar Andrian Sumardi. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)*.
- Joindra Nendher, Gordon Angel May, Cliver Londa, Jantje J. Tinangon. (2018). *Ipteks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bmd) Di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara*.
- Karnanto Priyono. (2012). *Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua : Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang*.
- Khoirul Syahputra. (2018). *Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas*.
- Mahfudz, A. (2017). *Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Masyhuri. (2014). *Penerapan Akuntansi Dan Manajemen Aset Tetap Dalam Laporan Barang Milik Negara Pada Stain Watampone*.

-
- Mhd. Habibi Arifin. (2011). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.*
- Muhammad Rizky Pratama, Bill Pangayow. (2016). *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.*
- Parta Ibeng. (2021). *Pengertian Efektivitas (pendidikan.co.id).*
- Prasetyo. (2015). *Penelitian Kualitatif, Teknik Analisa Data : Resume Buku Prof Soegiyono Bab VI. Prsfapet.*
- Rahmat Yuliansyah. (2016). *Analisis Sistem Inventarisasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi.*
- Ropida Rezeki Utami, Aliamin, Heru Fahlevi.(2019). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.*
- Siti Amerieska, Fita Setiati, Imam Mulyono. (2018). *Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang).*
- Sufri Nuryamin. (2015). *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015.*
- Syadza Hikmawati Tamsir. (2018). *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.*
- Triski Ovine Piri. (2016). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara.*

